

## IMPLIKASI OTONOMI DAERAH PADA PEMBANGUNAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI INDONESIA

Ringgo Saprianto<sup>1\*</sup>, Tiur Roida Simbolon<sup>2</sup>, Alexandra Hukom<sup>3</sup>

Ekonomi Pembangunan, Universitas Palangka Raya<sup>1,2,3</sup>

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received 5 September 2023

Revised 13 Oktober 2023

Accepted 20 Oktober 2023

**Keywords:** public policy, regional autonomy, education, health

**Kata Kunci:** kebijakan publik, otonomi daerah, pendidikan, kesehatan

### ABSTRACT

*This study examines the implications of regional autonomy on the development of Indonesia's education and health sectors. The research method used is descriptive analysis through literature studies by collecting study data from various sources, such as documents and reports related to the development of Indonesia's education and health sectors. In the education sector, regional autonomy has allowed local governments to manage the education budget independently and make education policies that align with local needs. However, challenges, such as disparities in access to education between regions, still need to be overcome. In the health sector, regional autonomy has enabled local governments to plan, manage and finance health services. However, problems remain, such as the quality and access to health services that are not evenly distributed throughout Indonesia. The research results show that the implementation of regional autonomy has significantly impacted the development of the education and health sectors in Indonesia. Thus regional autonomy provides excellent potential for the development of the education sector and the health sector in Indonesia but still requires further efforts to address existing challenges and problems. Therefore, collaboration is needed between the central and regional governments in planning, managing, and financing the education and health sectors to improve the quality of life of the Indonesian people.*

### ABSTRAK

Studi ini mengkaji implikasi otonomi daerah terhadap perkembangan sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui studi pustaka dengan mengumpulkan data kajian dari berbagai sumber, seperti dokumen dan laporan terkait perkembangan sektor pendidikan dan kesehatan Indonesia. Di bidang pendidikan, otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah mengelola anggaran pendidikan secara mandiri dan membuat kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun, tantangan seperti kesenjangan akses pendidikan antar daerah masih perlu diatasi. Di bidang kesehatan, otonomi daerah telah memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengelola, dan membiayai pelayanan kesehatan. Namun, permasalahan tetap ada, seperti kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang tidak merata di seluruh Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah berdampak signifikan terhadap perkembangan sektor pendidikan

dan kesehatan di Indonesia. Dengan demikian otonomi daerah memberikan potensi yang sangat baik bagi pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia namun masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan dan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, pengelolaan, dan pembiayaan bidang pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

© Published Year

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

---

\*Corresponding author :

Address : Palangka Raya, Indonesia

E-mail : [ringgo.gogo03@gmail.com](mailto:ringgo.gogo03@gmail.com), [tiur.roida@feb.upr.ac.id](mailto:tiur.roida@feb.upr.ac.id), [alexandra.hukom@feb.upr.ac.id](mailto:alexandra.hukom@feb.upr.ac.id)

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah sebuah konsep desentralisasi kekuasaan yang diberikan oleh kekuasaan tertinggi pusat untuk daerah secara utuh. Konsep ini diterapkan di Indonesia sejak tahun 1999 setelah melalui proses perjuangan yang panjang. Sebelumnya, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat sentralistik, dimana semua keputusan dan kebijakan diambil oleh pemerintah pusat. Akibatnya, daerah-daerah di Indonesia tidak memiliki kewenangan pengaturan yang memadai dan mengembangkan wilayahnya sendiri. Latar belakang dari diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur dan mengembangkan wilayahnya (Sani, A., & pada, M., 2017). Otonomi daerah juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang relevan dengan wilayahnya (Suparto, S. 2017). Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat lebih mandiri dan berkembang secara merata (Muhammad Farid Fanani, 2022). Dalam sektor pendidikan, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengembangkan sistem pendidikan di daerahnya (Winarsih, S., 2013). Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan di daerahnya. Otonomi daerah juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan di daerahnya. Dalam sektor kesehatan, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengembangkan sistem kesehatan di daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat di daerahnya. Selain itu, otonomi daerah juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan di daerahnya.

Meskipun demikian, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih mengalami beberapa tantangan dan kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di daerah (Jašková & Haviernikova, 2021). Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal dalam hal pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur (Muqoyyidin, A. W., 2013). Karena itu pemerintah dan masyarakat perlu terus bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Salah satu upaya

yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah melalui pendidikan dan pelatihan (Anita, A., et al., 2013). Pemerintah juga perlu memberikan dukungan yang cukup kepada daerah dalam hal pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur (Winarsih, S., 2013). Dalam sektor pendidikan, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah. Salah satu inisiatif yang mungkin dilakukan adalah meningkatkan kualitas guru dan pendidik lokal. Selain itu, pemerintah perlu memberikan dukungan yang cukup kepada daerah dalam hal pengembangan infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan sekolah dan perpustakaan.

Dalam sektor kesehatan, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan daerah. Salah satu inisiatif yang mungkin dilakukan adalah meningkatkan kualitas tenaga kesehatan setempat. Selain itu, negara juga harus mengambil tindakan pencegahan dukungan yang cukup kepada daerah dalam hal pengembangan infrastruktur kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit dan puskesmas. Dalam kesimpulannya, otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur dan mengembangkan wilayahnya (Hariyanto, H., & Tukidi, T., 2007). Dalam sektor pendidikan dan kesehatan, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengembangkan sistem pendidikan dan kesehatan di daerahnya. Namun, pelaksanaan otonomi daerah di sektor pendidikan dan kesehatan masih mengalami beberapa kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan kesenjangan antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal dalam hal akses dan kualitas pelayanan (Yandri, P., 2012). Pemerintah dan masyarakat perlu terus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah dan mengatasi kendala yang ada. Salah satu inisiatif yang mungkin dilakukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah melalui pendidikan dan pelatihan, serta memberikan dukungan yang cukup kepada daerah dalam hal pengembangan infrastruktur pendidikan dan kesehatan (Man, S., 2020). Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan otonomi daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Kajian ini memiliki tujuan yang rinci dan komprehensif untuk menyelidiki dampak pemerintah daerah terhadap pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Tujuan pertama adalah menganalisis dampak otonomi daerah terhadap peningkatan dan pengembangan sektor pendidikan di tingkat daerah. Fokus penelitian ini adalah pada peningkatan perubahan kebijakan, alokasi sumber daya dan akses pendidikan dengan memberdayakan pemerintah daerah. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi dan untuk menilai apakah otonomi daerah telah berhasil mendorong pembangunan sektor pendidikan daerah. Tujuan kedua adalah menilai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan di tingkat daerah. Kajian ini mengkaji sejauh mana pemerintah daerah menerapkan inovasi kebijakan pendidikan yang berdampak positif terhadap mutu pendidikan di daerah yang dipimpinnya. Evaluasi ini akan membantu mengukur keberhasilan otonomi daerah dalam mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, tujuan ketiga adalah meneliti pengaruh otonomi daerah terhadap pembangunan sektor kesehatan di

daerah. Penelitian ini akan menganalisis perubahan kebijakan, alokasi sumber daya, dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan setelah penerapan otonomi daerah. Analisis ini penting untuk memahami dampak otonomi daerah pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah di sektor pendidikan dan kesehatan. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, ketidaksesuaian kebijakan, dan kurangnya koordinasi antar lembaga akan diidentifikasi untuk memahami kendala-kendala yang harus diatasi dalam mengimplementasikan otonomi daerah di kedua sektor tersebut. Kemudian penelitian ini adalah mengemukakan rekomendasi kebijakan konkret yang dapat memperbaiki implementasi otonomi daerah dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dan memaksimalkan potensi dari kebijakan otonomi daerah untuk memajukan sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Dengan tercapainya tujuan tersebut, studi ini akan memberikan wawasan mendalam tentang dampak pemerintah daerah terhadap pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan, serta berkontribusi secara signifikan dalam perumusan kebijakan yang relevan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan.

Penelitian ini berfokus tentang implikasi otonomi daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah, serta untuk mengetahui sejauh mana otonomi daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas otonomi daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah upaya berpikir rasional untuk mencapai tujuan ideal keadilan, efisiensi, keamanan, kebebasan, dan tujuan masyarakat itu sendiri (Taufiqurokhman & Satispi, 2022). Kebijakan publik adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatur dan mengelola isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kebijakan publik biasanya dirancang untuk memecahkan masalah, mengatur distribusi sumber daya, mempromosikan kesejahteraan masyarakat, atau mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu (Moeljono et al., 2020). Kebijakan publik melibatkan proses pengambilan keputusan yang kompleks, yang melibatkan identifikasi masalah, analisis kebijakan, pengembangan alternatif kebijakan, pemilihan kebijakan yang optimal, implementasi kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan. Kebijakan publik dapat diterapkan di berbagai bidang, seperti ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, dan lain sebagainya (Abdal et al., 2021). Kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai-nilai masyarakat, kepentingan politik, aspirasi masyarakat, data dan analisis kebijakan, serta keterlibatan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan publik dapat berdampak besar bagi masyarakat dan dikelola secara bijaksana untuk mencapai hasil yang diinginkan (Desrinelti et al., 2021).

## Otonomi daerah

Otonomi daerah adalah prinsip atau konsep yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, atau kota, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kebijakan di wilayahnya, sesuai kebutuhan karakteristik lokal mereka (Prabowo & Rafli, 2022). Meningkatkan otonomi daerah melalui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mengurangi sentralisasi kebijakan di pemerintah pusat, dan memfasilitasi pengambilan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal (Sommaliagustina et al., 2019). Dalam konteks otonomi daerah yang diatur dalam UU No 23 tahun 2014, perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi penting, birokrasi pemerintah berfungsi sebagai pelayanan publik dan kualitas SDM menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah, meningkatnya kemampuan aparatur birokrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik menjadi salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah (Hulwah, 2020). Otonomi daerah menuntut birokrasi untuk terus berinovasi meningkatkan kualitas pelayanan dan kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain dan menarik investasi, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah (Rikza, 2022).

## Pendidikan

Otonomi sektor pendidikan merujuk pada kewenangan dan otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di wilayahnya, selain itu otonomi sektor pendidikan memberikan pemerintah daerah kebebasan untuk mengambil kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan kondisi lokal, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran, perencanaan pembangunan pendidikan, pengaturan kurikulum, peningkatan mutu pendidikan, dan pengelolaan sumber daya manusia dalam sektor pendidikan (Sampaleng & Baharuddin, 2023). Otonomi sektor pendidikan memungkinkan otoritas lokal mengambil tindakan yang tepat karakteristik, kebutuhan, dan potensi lokal di daerah mereka, hal ini memberikan kemandirian dan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan yang dapat disesuaikan dengan keunikan dan keberagaman setiap daerah (Nor Azazi et al., 2018). Pendidikan merupakan komponen penting dalam pembangunan. Karena melalui pendidikan, kita bisa menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi baru dan menciptakan tenaga kerja yang siap pakai (Pendidikan et al., 2022). Dengan otonomi sektor pendidikan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah mereka secara maksimal, berbarengan dengan itu dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat, penggunaan sumber daya lokal, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kearifan lokal dan budaya daerah (Lainah et al., 2022). Otonomi sektor pendidikan memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap kebutuhan lokal dalam pendidikan (Oktavian & Adi, 2021).

## Kesehatan

Otonomi daerah memberdayakan pemerintah daerah mengelola dan mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan layanan kesehatan di wilayahnya, termasuk dalam sistem perawatan kesehatan untuk ibu, anak dan masyarakat. Sistem pelayanan kesehatan yang efektif dan berkualitas sangat penting dalam meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat (Azwansyah & Juniardi, 2014). Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pelayanan

kesehatan dapat dikelola dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Littik, 2023). Pelayanan kesehatan untuk seluruh penduduk memerlukan sinergi antara teknologi kedokteran dan kesehatan, serta tersedianya sumber daya yang memadai di berbagai negara, baik di negara maju maupun negara berkembang (Herawati & Bakhri, 2019). Perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan program kesehatan tingkat daerah harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kondisi kesehatan lokal, kebutuhan masyarakat, serta sumber daya yang tersedia (Meirinsyah et al., 2022).

### **Hipotesis**

Hipotesis mengenai dampak dari kebijakan otonomi daerah di Indonesia terhadap bidang pendidikan dan kesehatan dapat dirumuskan sebagai berikut “penerapan kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah memberikan dampak positif maupun negatif bagi sektor pendidikan dan kesehatan daerah dalam hal peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan di masyarakat.”

Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah dengan otonomi daerah memiliki kontrol yang lebih banyak terhadap anggaran dan kebijakan bidang pendidikan dan kesehatan di daerahnya. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyelaraskan program dan kebijakan mereka dengan kebutuhan masyarakat mereka. Selain itu, otonomi daerah juga dapat memfasilitasi terciptanya persaingan yang sehat antar daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

### **METODA PENELITIAN**

Metodologi penelitian melibatkan berbagai aspek, mulai dari pendekatan yang dipilih, metode penelitian yang digunakan, unit analisis yang diteliti, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, hingga pemeriksaan kualitas data penelitian (Siregar, 2021). Metode penelitian studi literatur adalah bahwa metode ini melibatkan peninjauan, analisis, dan sintesis terhadap literatur. Metode ini cocok digunakan untuk menyusun kerangka teoritis, menyajikan tinjauan literatur, atau menjawab pertanyaan penelitian yang tidak memerlukan pengumpulan data primer (Salmon et al., 2022). Dengan menggunakan metode penelitian studi literatur, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian yang telah dikaji sebelumnya, sehingga dapat menginformasikan pengembangan konsep, teori, atau hipotesis penelitian yang lebih lanjut.

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Otonomi daerah berdampak positif pada pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemisahan kekuasaan ini memungkinkan adanya pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengelola wilayah mereka secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan lokal mereka. Hal ini akan memungkinkan pengembangan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Sambodho, P., & Napitupulu, D., 2020). Selain itu, pembagian kewenangan ini juga dapat mempercepat

proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan, karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri tanpa menunggu persetujuan pemerintah pusat. Alokasi kapasitas dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia selama ini dinilai sangat diharapkan dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Selain kewenangan untuk mengatur dan mengelola wilayahnya, pemerintah daerah juga diberi hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya forum pelibatan masyarakat yang dibentuk dalam bentuk kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Badan Pertimbangan Desa (BPD). Keterlibatan masyarakat tidak sebatas memberikan masukan dan saran untuk perencanaan, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pemantauan pembangunan. Melalui partisipasi aktif pemerintah daerah, pembangunan daerah harus lebih tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan, serta tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan warganya.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar untuk mengelola dan mengontrol pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih fokus memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Selain itu, terlibatnya masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan membuat pembangunan infrastruktur menjadi lebih efektif dan efisien (Purwanto, A. J., & Rahayu, R., 2019). Infrastruktur yang memadai dan berkualitas meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan menciptakan pemerataan pembangunan antar daerah di Indonesia. Otonomi daerah juga sangat bermanfaat bagi peningkatan pelayanan publik di Indonesia. Sejak otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah berfokus pada perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan keselamatan (Pratiwi, E., & Wahyuni, E., 2021). Di bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan daerah. Di bidang pendidikan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar guna meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan dan membangun infrastruktur pendidikan yang lebih baik. Di bidang keamanan, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas keamanan di daerahnya dengan meningkatkan keamanan lingkungan dan menambah jumlah aparat keamanan di daerahnya. Manfaat ini sangat penting dalam jangka panjang. Masyarakat yang lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih aman berdampak positif pada pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Lebih lanjut, dengan adanya otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan dan program pelayanan publik dengan kebutuhan dan kemungkinan daerahnya masing-masing, sehingga meningkatkan kepuasan warga penyediaan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah memiliki manfaat yang langgeng dalam meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Peran pemerintah dalam otonomi daerah di bidang pendidikan tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan adalah keterbatasan sumber dana. Keterbatasan anggaran yang tersedia seringkali tidak dapat mendanai program pendidikan terbaik, berdampak pada aspek-aspek utama seperti penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan akses terhadap teknologi pendidikan. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan kreatif dan kolaboratif. Solusi yang memungkinkan termasuk bekerja sama dengan sektor swasta dan donor untuk menemukan sumber pendanaan alternatif, menetapkan prioritas yang tepat untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia, dan mendukung pengembangan pendidikan lokal, termasuk membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk upaya ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang terbatas tidak menghambat kemajuan dan pemerataan akses di bidang pendidikan di tingkat daerah (Saputra, A., & Siregar, H., 2019).

Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur bidang pendidikan dapat menimbulkan disparitas pendidikan antar daerah. Disparitas ini disebabkan oleh perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Beberapa daerah mampu mengembangkan pendidikan berkualitas berkat ketersediaan sumber daya yang melimpah, sementara yang lain menghadapi kendala ekonomi, infrastruktur yang buruk, dan kekurangan tenaga kerja terampil. Kesenjangan pendidikan juga tercermin dalam akses, dengan daerah-daerah dengan sumber daya terbatas berjuang untuk menyediakan siswa dengan fasilitas dan transportasi pendidikan yang memadai. Hal ini mempersulit siswa di daerah tersebut untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dengan siswa di daerah maju. Ketimpangan juga terlihat dalam kualitas pendidikan. Daerah dengan sumber daya terbatas tidak dapat menyediakan guru berkualitas atau mengembangkan kurikulum modern. Akibatnya, kualitas pendidikan di daerah-daerah tersebut terbatas, sedangkan daerah lain dapat memberikan pendidikan yang lebih baik berkat sumber daya yang melimpah. Ada juga kesenjangan regional dalam kesempatan pendidikan. Daerah dengan sumber daya yang terbatas tidak dapat memberikan siswa yang berkualitas dengan program pendidikan berkelanjutan, beasiswa dan dukungan pendidikan yang memadai. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan kesempatan pendidikan antar daerah. Pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan berkeadilan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antar daerah. Hal itu dapat dicapai melalui pemerataan alokasi anggaran, peningkatan akses pendidikan, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai. Kerjasama antar daerah dan pertukaran best practice juga dapat memperkuat pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan untuk mengurangi kesenjangan dan mencapai pemerataan pendidikan antar daerah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalkan kesenjangan pendidikan antar daerah dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas (Pendit, N. A., 2018).

Otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sektor pendidikan, dapat menimbulkan tantangan koordinasi antar lembaga pendidikan. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan

pendidikan seperti pemerintah daerah, sekolah, dinas pendidikan, dan perguruan tinggi perlu menjalin kerjasama yang efektif guna mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Salah satu tantangan dalam koordinasi antarlembaga adalah belum adanya mekanisme koordinasi. Setiap lembaga memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan pendidikan, namun kebebasan tersebut dapat menghambat sinergi dan kerjasama antar lembaga (Zamzami, F., & Rahman, F., 2020). Kurangnya koordinasi yang efektif dapat menyebabkan duplikasi program, ketidaksepakatan kebijakan, dan fragmentasi upaya yang saling mendukung. Selain itu, perbedaan visi, misi, dan prioritas antar instansi pemerintah juga dapat menjadi penghambat koordinasi. Setiap lembaga pendidikan mungkin memiliki prioritas dan tujuan yang berbeda dalam menyelenggarakan pendidikan. Pandangan yang tidak selaras dan arah strategis dapat mempersulit koordinasi antar lembaga dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas. Kurangnya ketersediaan platform dan forum untuk memfasilitasi dialog dan berbagi informasi antar instansi pemerintah juga dapat menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi terstruktur dapat menghambat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik di seluruh institusi. Hal ini dapat menghambat upaya perbaikan dan inovasi di bidang pendidikan. Penguatan mekanisme koordinasi dan kerjasama penting untuk mengatasi tantangan koordinasi antar lembaga di pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan forum dan platform di mana instansi terkait dapat berinteraksi dan berbagi informasi secara rutin. Selanjutnya, semua pemangku kepentingan harus berkomitmen untuk menciptakan kesamaan visi dan misi yang akan mengarah pada pembangunan pendidikan yang holistik dan berkeadilan. Perumusan kebijakan yang koheren dan sinergis juga harus diperhatikan untuk memungkinkan pelaksanaan tujuan pendidikan nasional yang efektif di tingkat daerah. Koordinasi yang baik antar lembaga pendidikan dapat mengoptimalkan potensi sinergi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan. Langkah ini akan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman, meningkatkan implementasi kebijakan yang koheren dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Isfandiari, E., & Nugraha, E., 2020). Hal ini akan memungkinkan pendidikan daerah berkembang lebih baik dan memberikan manfaat yang sama bagi seluruh masyarakat.

Implementasi dan penggunaan di kota-kota dengan tingkat otonomi daerah yang tinggi, pemerintah daerah memiliki anggaran yang terbatas untuk membangun infrastruktur pendidikan yang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan sektor swasta dan LSM untuk menggalang dana tambahan untuk membangun sekolah baru dan memperbaiki fasilitas pendidikan yang ada. Di provinsi terpencil dan terpencil, pemerintah daerah menggunakan kebijakan pemerintah daerah untuk memprioritaskan pendidikan di daerah tersebut. Ini akan memberikan sumber daya tambahan untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, memberikan insentif bagi guru untuk mengajar dari jarak jauh, dan meningkatkan akses ke lembaga pendidikan. Kemudian pada tantangan utama bagi pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang kesehatan adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan ini dapat berupa keterbatasan anggaran dan terbatasnya staf medis yang berkualitas dan terlatih. Dalam hal pengalokasian anggaran kesehatan, beberapa daerah mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan fasilitas, obat-obatan dan peralatan kesehatan. Keterbatasan anggaran dapat mempersulit masyarakat untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan yang mereka butuhkan untuk menyediakan layanan yang memadai. Sebagai contoh, beberapa wilayah di Indonesia, terutama di daerah terpencil atau tertinggal, mungkin memiliki keterbatasan dalam menyediakan fasilitas medis yang memadai bagi masyarakatnya. Selain itu, kurangnya staf medis yang berkualitas dan terlatih menimbulkan tantangan terhadap penyediaan layanan kesehatan yang memadai di wilayah tersebut, dan daerah yang kurang berkembang dan terpencil merasa sulit untuk menarik dan mempertahankan staf medis yang berkualitas. Kekurangan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya dapat mempengaruhi akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai dan menambah beban kerja tenaga kesehatan yang ada. Namun, ada contoh yang jelas tentang pengenalan dan penggunaan otonomi daerah di bidang kesehatan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Salah satu contohnya adalah Jawa Barat, Indonesia. Pemerintah provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran kesehatan yang lebih besar berdasarkan otonomi daerah. Dengan anggaran lebih, anda dapat membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dengan peralatan medis yang memadai. Selain itu, peningkatan jumlah tenaga medis juga dilakukan. Hal ini telah meningkatkan akses ke layanan medis yang lebih baik bagi masyarakat di Jawa Barat dan meningkatkan kualitas layanan medis di wilayah tersebut. Singkatnya, sumber daya yang terbatas merupakan tantangan terbesar dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesehatan. Namun, dengan alokasi anggaran yang tepat dan upaya peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis, tantangan ini dapat diatasi. Contoh penerapan otonomi daerah di provinsi Jawa Barat adalah dengan kebijakan yang tepat, pemerintah daerah dapat memanfaatkan otonomi daerah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan. Dapat ditingkatkan.

Ketimpangan akses dan kualitas pelayanan kesehatan antar daerah merupakan salah satu tantangan yang ditimbulkan dari pelaksanaan otonomi daerah. Jika pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk mengelola sektor kesehatan, daerah yang lebih maju dan memiliki sumber daya yang baik dapat menyediakan layanan kesehatan yang lebih berkualitas (Yustika, A. E., & Kusumawardhani, N., 2019). Namun, mungkin sulit untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang sama di daerah lain dengan sumber daya yang terbatas (Husodo, Z. A. (2020). Dampak dari ketimpangan akses dan kualitas pelayanan kesehatan tersebut adalah munculnya ketimpangan antar wilayah. Masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal mungkin sulit untuk mengakses layanan kesehatan yang layak dengan mudah. Selain itu, kualitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut juga mungkin lebih rendah dibandingkan dengan daerah maju. Hal ini dapat menimbulkan disparitas kesehatan daerah, dimana masyarakat di daerah tertentu tidak memiliki akses pelayanan kesehatan yang setara dengan daerah lain (Adelina, V. N., & Haryanti, S., 2020). Contoh nyata penerapan dan pemanfaatan otonomi daerah di bidang kesehatan adalah provinsi Aceh di Indonesia. Aceh menghadapi tantangan untuk menyediakan akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi penduduknya, terutama di daerah terpencil dan sulit diakses. Untuk mengatasinya, pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai upaya. Mereka membangun lebih banyak

fasilitas medis di daerah terpencil, mengirim petugas kesehatan ke daerah tersebut, dan memperkuat program kesehatan masyarakat. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh negara bagian. Ringkasnya, otonomi daerah dapat menimbulkan ketimpangan akses dan kualitas pelayanan kesehatan antar daerah. Ketimpangan ini dapat menimbulkan ketimpangan kesehatan yang merugikan masyarakat. Contoh praktik otonomi daerah di Aceh menunjukkan upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan aksesibilitas layanan medis di daerah terpencil dan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan.

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan merupakan tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan otonomi daerah di sektor kesehatan (Wicaksono, A., & Santosa, B., 2021). Perbedaan kebijakan, prioritas, dan pendekatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menghambat kerjasama yang efektif dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Kurangnya koordinasi antar lembaga juga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan kesehatan yang terintegrasi dan menyebabkan ketidakberlanjutan dalam program-program kesehatan. Salah satu contoh nyata yang menggambarkan tantangan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah di sektor kesehatan adalah implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Meskipun program ini bertujuan untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan yang merata dan luas di seluruh Indonesia, namun dalam pelaksanaannya di berbagai daerah masih ditemui kendala dalam koordinasi antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Perbedaan kebijakan dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait menjadi tantangan dalam memastikan penyediaan pelayanan kesehatan yang efektif dan terintegrasi di seluruh daerah. Implementasi program JKN membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang konsisten dan terkoordinasi. Salah satu pendekatan untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan membentuk forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan terkait. Forum ini dapat menjadi wadah untuk menyatukan visi, tujuan dan kebijakan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dan menciptakan koordinasi yang lebih baik di antara berbagai institusi yang terhubung. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan komunikasi dan berbagi informasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dapat dicapai melalui pertemuan rutin, dialog kebijakan dan pertukaran data yang akurat dan tepat waktu. Komunikasi yang baik mengatasi perbedaan kebijakan dan pendekatan serta mengarah pada koordinasi yang lebih efektif dalam implementasi kebijakan kesehatan. Upaya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan juga dapat didukung dengan perangkat regulasi yang jelas dan modern (Ghufron, M. N., & Huda, A. N., 2019). Dalam konteks otonomi daerah, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan memberikan kelonggaran yang cukup bagi pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Selain itu, ada juga kebutuhan untuk memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi kebijakan untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif di tingkat lokal. Semangat kerjasama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diprioritaskan dalam menghadapi tantangan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Kerja sama yang baik

mengarah pada kebijakan kesehatan terpadu, program berkelanjutan, dan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat di semua wilayah (Suhartanto, D., & Kurniawan, R., 2020).

Tantangan terkait kapasitas dan kompetensi manusia merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesehatan. Pemerintah daerah seringkali mengalami kesulitan dalam merekrut, melatih, dan mempertahankan tenaga kesehatan yang memenuhi syarat di wilayahnya. Kekurangan tenaga yang berkualitas dapat berdampak buruk pada kualitas layanan kesehatan yang disediakan di wilayah tersebut (Dapilah, N. A., Kurniawati, D., & Wahyudi, S., 2021). Sebagai contoh nyata penggunaan otonomi daerah untuk mengatasi masalah tenaga kesehatan, provinsi Bali di Indonesia telah menerapkan program beasiswa untuk mendukung pelatihan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan di daerah. Untuk itu, pemerintah daerah Bali berupaya meningkatkan kapasitas tenaga medis lokal dan mengurangi ketergantungan tenaga medis dari luar daerah. Langkah-langkah strategis perlu diambil untuk menjawab tantangan kapasitas dan kompetensi manusia dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesehatan. Pertama, pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama dalam merancang kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang kesehatan. Ini dapat meliputi pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang relevan, termasuk program beasiswa seperti yang dilakukan oleh provinsi Bali. Selain itu, penting untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendidikan di daerah, termasuk pendirian sekolah kedokteran, keperawatan, dan institusi pendidikan medis lainnya. Dengan adanya fasilitas yang memadai, akan lebih mudah menarik dan mempertahankan tenaga medis berkualitas di daerah tersebut. Selain upaya pemerintah, kolaborasi dengan lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional juga dapat membantu memperkuat kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor kesehatan. Program kemitraan dan pertukaran pengetahuan antara berbagai pihak dapat memberikan peluang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga medis. Tantangan dalam kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor kesehatan dalam konteks otonomi daerah menunjukkan perlunya kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dengan kerjasama yang baik, dapat dihasilkan langkah-langkah strategis yang efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan, sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata di seluruh Indonesia.

Maka otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi ekonomi yang ada di daerahnya. Dengan mengenali kebutuhan dan karakteristik daerah, pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan dan program yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah (Firman, T., & HuiZenga, C., 2019). Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih beradaptasi dengan kebutuhan dan kemungkinan ekonomi lokal, daripada mengadopsi instrumen kebijakan yang bersifat umum dan mungkin tidak sesuai di tingkat nasional. Salah satu manfaat ekonomi utama dari pemerintah daerah adalah menciptakan peluang bagi masyarakat lokal dan pelaku ekonomi untuk lebih berperan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui partisipasi masyarakat luas dan pelaku ekonomi lokal, otonomi daerah dapat memberdayakan ekonomi

lokal itu sendiri. Ini menciptakan dorongan ekonomi yang kuat di tingkat lokal dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan di daerahnya. Pemerintah daerah dapat menarik investasi dari luar daerah dengan pemahaman yang mendalam tentang sumber daya alam, kekayaan budaya dan potensi industri daerah. Investasi ini akan membantu meningkatkan daya saing kawasan, menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, otonomi daerah membantu mempersempit kesenjangan antara pemerintah daerah dan pusat. Dengan perkembangan ekonomi daerah, daerah yang tertinggal di masa lalu juga dapat mencapai perkembangan ekonomi yang signifikan. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal juga dapat berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi, dan kualitas hidup yang lebih baik secara umum (Akbar, R., & Pujiyanto, S. H., 2020). Namun, harus diakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konteks ekonomi dapat menghadapi tantangan. Pemerintah daerah harus memiliki kapasitas administratif yang memadai untuk mengelola potensi ekonomi dan menerapkan kebijakan ekonomi yang efektif. Selain itu, pencapaian tujuan pembangunan ekonomi memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah yang koheren dan saling mendukung. Secara keseluruhan, otonomi daerah diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing daerah, menarik investasi dan memperkuat ekonomi daerah. Namun, untuk mencapai hal ini diperlukan perencanaan yang baik, kapasitas manajemen yang baik, dan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Otonomi daerah di Indonesia telah membawa manfaat positif yang signifikan. Pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah memastikan fleksibilitas dan kemandirian dalam pengelolaan daerah dan pengambilan keputusan yang lebih tepat disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga aspirasi masyarakat harus diperhatikan dan dipertimbangkan serta ditanggapi secara tepat oleh pemerintah daerah. Hal ini akan mengarah pada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih efektif dan berkualitas. Selain itu, otonomi daerah mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberdayakan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi dan mengembangkan kebijakan yang tepat sesuai karakteristik daerah. Ini akan menciptakan peluang investasi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah. Dengan demikian, otonomi daerah berperan dalam memperkuat ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah pusat. Secara keseluruhan, otonomi daerah memiliki manfaat yang luas, termasuk pembagian kekuasaan, partisipasi masyarakat, peningkatan taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah memerlukan

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperhatikan peningkatan kapasitas dan kapasitas manusia. Dengan pendekatan yang tepat, pemerintah daerah dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Kajian tentang dampak otonomi daerah terhadap perkembangan sektor pendidikan dan kesehatan Indonesia memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: keterbatasan data, waktu, sumber daya, dan pengaruh faktor eksternal seperti kondisi politik dan ekonomi. Untuk penelitian lebih lanjut, studi perbandingan antar daerah di Indonesia, analisis lebih dalam tentang dampak otonomi daerah terhadap pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan, studi longitudinal untuk memantau perubahan dari waktu ke waktu, dan pendidikan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Kemandirian dalam pembangunan bidang kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, Hafizh, A., Maharani, A., & Qori, A. (2021). KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN MORAL. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19, 13–22. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.59>
- Adelina, V. N., & Haryanti, S. (2020). The impact of regional autonomy on public service quality: Case study of health services in Indonesia. *Journal of Public Administration Studies*, 4(2), 145-160.
- Akbar, R., & Pujiyanto, S. H. (2020). The effects of regional autonomy on economic growth in Indonesia: Empirical evidence from dynamic panel data. *Journal of Asian Economic Integration and Cooperation*, 5(1), 59-70.
- Anita, A., Lestari, H., & Lituhayu, D. (2013). Peran diklat dalam peningkatan kualitas SDM di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(1), 111-120.
- Azwansyah, H., & Juniardi, F. (2014). STUDI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DASAR DI KECAMATAN TELOK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA. STUDI KASUS DESA SUNGAI PADUAN DAN DESA MAS BANGUN. *LANGKAU BETANG: JURNAL ARSITEKTUR*, 1. <https://doi.org/10.26418/lantang.v1i1.18808>
- Dapilah, N. A., Kurniawati, D., & Wahyudi, S. (2021). The implementation of regional autonomy in Indonesia: Challenges and opportunities in the health sector. *Journal of Government and Civil Society*, 3(2), 120-139.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6, 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Firman, T., & Huizenga, C. (2019). Challenges and opportunities of decentralization for sustainable urban development in Indonesia. *Habitat International*, 84, 1-11.

- Ghufron, M. N., & Huda, A. N. (2019). The impact of regional autonomy on economic development in Indonesia. *Regional Science Inquiry*, 11(2), 91-102.
- Hariyanto, H., & Tukidi, T. (2007). Konsep Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang Indonesia Di Era Otonomi Daerah. *J Geogr Media Inf Pengemb dan Profesi Kegeografian*, 4(1), 1-10.
- Herawati, C., & Bakhri, S. (2019). Ketimpangan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Ekonomi di Wilayah Perbatasan. *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4, 17–27. <https://doi.org/10.31943/afiasi.v4i1.9>
- Hulwah, H. (2020). Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2, 21–27. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.59>
- Husodo, Z. A. (2020). The implementation of regional autonomy and its implications for economic growth in Indonesia. *Journal of Economics and Political Studies*, 3(2), 120-137.
- Isfandiari, E., & Nugraha, E. (2020). The role of local government in promoting economic growth: Evidence from Indonesia. *Journal of Local Government Studies*, 4(1), 55-70.
- Jašková, D., & Haviernikova, K. (2021). The Human Resources as an Important Factor of Regional Development. *International Journal of Business and Society*, 21, 1464–1478. <https://doi.org/10.33736/ijbs.3364.2020>
- Lainah, L., Zulmuqim, Z., Iswantir, I., & Trisno, B. (2022). Kebijakan Otonomi Daerah (Regional Autonomy Policy) dan Dampaknya pada Pendidikan Madrasah. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4, 6023–6031. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3553>
- Littik, S. (2023). Model Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Bayi Berbasis Otonomi Ibu Di Kabupaten Timor Tengah Selatan. <https://doi.org/10.31219/osf.io/bwpjd>
- Man, S. (2020). Analisis Peranan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai. *Akuntanika*, 6(1), 38-45.
- Meirinsyah, S., Kunci, K., Kesehatan, P., Covid, P., & Kesehatan, T. (2022). APAKAH TRANSFORMASI KESEHATAN PADA SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN DI INDONESIA PADA PASIEN COVID- 19, BERJALAN DENGAN LANCAR??
- Moeljono, M., Kartiko, W., Kunci, K., Pelatihan, Publik, K., & Desa, A. (2020). PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PUBLIK BAGI APARATUR DESA DI DESA TEGALARUM KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH. 153–160. <https://doi.org/10.31764/jces.v3i1.1547>
- Muhammad Farih Fanani. (2022, September 8). Tujuan Otonomi Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Ketahui Pengertian dan Prinsipnya | merdeka.com. Merdeka.com; Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/trending/tujuan-otonomi-daerah-menurut-uu-no-32-tahun-2004-ketahui-pengertian-dan-prinsipnya-kln.html>

- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 287-310.
- Nor Azazi, N. A., Ahmad, H., & Jusoh, H. (2018). PERANAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DALAM MENJANA EKONOMI PENGALAMAN DALAM SEKTOR PENDIDIKAN.
- Oktavian, D., & Adi, E. (2021). IMPLEMENTASI PENDANAAN SEKTOR PENDIDIKAN DALAM MASA OTONOMI KHUSUS PAPUA. *Khatulistiwa Law Review*, 2, 359–378. <https://doi.org/10.24260/klr.v2i2.387>
- Pendidikan, P., Keunggulan, B., Di, L., Tinggi, P., Relevansinya, D., Pembangunan, T., Riau, E., Lancang, U., Jln, K., Yos, S., Km, & Maryanti, S. (2022). Paradigma Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di Perguruan Tinggi dan Relevansinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Riau. *Jurnal Daya Saing*, 8. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v8i3.1117>
- Pendit, N. A. (2018). Implementasi Otonomi Daerah: Konsep, Teori, dan Praktik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prabowo, L., & Rafli, M. (2022). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2, 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.56>
- Pratiwi, E., & Wahyuni, E. (2021). Regional autonomy and public service delivery in the health sector: A case study in West Java, Indonesia. *International Journal of Public Administration and Management Research*, 4(1), 25-38.
- Purwanto, A. J., & Rahayu, R. (2019). The impact of regional autonomy on education development in Indonesia. *Journal of Educational Administration and Policy Studies*, 11(1), 40-56.
- Rikza, M. (2022). OTONOMI DAERAH DAN REFORMASI BIROKRASI. *Public Service and Governance Journal*, 3, 81. <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2793>
- Salmon, I., Irawan, A., Lestari, A., Nurany, F., & Rahmat, I. (2022). Buruknya Layanan dalam Kerangka Otonomi Khusus: Apakah Papua Masih Memiliki Kesempatan untuk Berkembang? *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11, 367–380. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i3.40754>
- Sambodho, P., & Napitupulu, D. (2020). Decentralization and local economic development in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 31(1), 53-68.
- Sampaleng, D., & Baharuddin, B. (2023). Analisis Manfaat Perencanaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kecamatan Babela. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17, 14. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1953>
- Sani, A., & pada, M. (2017, July 18). Otonomi Daerah Esensi, Tujuan dan Manfaatnya Bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Badan Kepegawaian Dan Pengembangan*

- SDM Daerah. <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi-daerah-esensi-tujuan-dan-manfaatnya-bagi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung>
- Saputra, A., & Siregar, H. (2019). Regional autonomy and poverty alleviation in Indonesia. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(1), 15-30.
- Siregar, I. A. (2021). Analisis Dan Interpretasi Data Kuantitatif. *ALACRITY : Journal of Education*, 39–48. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.25>
- Sommaliagustina, D., Kunci, K., Daerah, O., Korupsi, K., Daerah, & Sommalia, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>
- Suhartanto, D., & Kurniawan, R. (2020). The effect of regional autonomy on income inequality in Indonesia. *Journal of Economic Studies*, 47(1), 82-97.
- Suparto, S. (2017). Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya.
- Taufiqurokhman, T., & Satispi, E. (2022). Design Dalam Kebijakan Publik.
- Wicaksono, A., & Santosa, B. (2021). The impact of regional autonomy on local economic development: A case study in Yogyakarta Special Region, Indonesia. *Journal of Economic Development, Environment, and People*, 10(2), 28-41.
- Winarsih, S. (2013). Sistem pembiayaan pendidikan dan otonomi Daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 18(2), 265-286.
- Yandri, P. (2012). Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kota Tangerang. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 3(2).
- Yustika, A. E., & Kusumawardhani, N. (2019). The role of regional autonomy in promoting tourism development: Case study of Bali, Indonesia. *Tourism and Hospitality Research*, 19(2), 189-200.
- Zamzami, F., & Rahman, F. (2020). Regional autonomy and public service delivery: Case study of education sector in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 90-104.